

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA RSUD KABUPATEN SUKABUMI DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Asti Nuriah¹⁾, Suratno²⁾, JMV Mulyadi³⁾
¹⁾²⁾³⁾Universitas Pancasila

ABSTRACT

The point of this research is to examine whether government accountant implementation standard effecting the quality of the information report of the financing, whether information technology is a moderating variable that can moderates the effect of government accountant implementation standard towards the quality of the information report of the financing, whether information technology is a moderating variable that can moderates the effect of human resources competency towards the quality of the information report of the financing and whether information technology is a moderating variable that can moderates the effect of intern's system control towards the quality of the information report of the financing.

This research rely on respondents from 57 finance administrator that work at RSUD Sukabumi District. The employing the purposive sampling technique for the sample collecting and as for the data analysis using the structural equation modeling based component with the help of Smartpls 3.0 program. The result of the research shows that goverment accountant implementation standard effecting the quality of the information report of the financing, but did not effecting quality of the information report of the financing with moderating information technology, human resources competency did not effect the quality of the information report of the financing, the intern's system control effecting the quality of the information report of the financing, but did not effecting quality of the information report of the financing with moderating information technology.

Keywords: *government accounting standard, human resource competency, intern system control, information technology and quality of information reports financial.*

PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak kewarganegaraannya, pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab dalam menciptakan tata kelola yang baik dituntut untuk melakukan perubahan dalam sistem manajemen keuangan

pemerintah. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik di Indonesia, dalam bidang keuangan negara pemerintah bersama dengan DPR RI telah menetapkan tiga paket undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut merupakan pedoman pemerintah untuk mereformasi sistem manajemen keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta pertanggungjawaban keuangan yang pada intinya mereformasi sebuah sistem penganggaran dari sistem penganggaran

tradisional ke sistem penganggaran berbasis kinerja, di mana pembiayaan tidak hanya membiayai masukan (*inputs*) atau proses, tetapi sudah diarahkan pada pembiayaan yang membiayai hasil (*outputs*). (Islamiati Hidayah,2017).

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 1 menyatakan bahwa instansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD akan mendapatkan keleluasaan dalam menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Untuk itu dibutuhkan kesiapan Rumah Sakit Daerah dalam rangka implementasi regulasi yang ada.

Rumah Sakit Daerah (RSD), baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus, adalah salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat mengingat keberadaannya menyebar di berbagai pelosok tanah air.

Banyak sekali anggota masyarakat yang mengandalkan pelayanan kesehatannya kepada institusi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota ini. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi adalah RSUD Palabuhanratu dan RSUD Sekarwangi.

Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu dan Sekarwangi Kabupaten Sukabumi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sukabumi sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), hal ini berarti Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu dan Sekarwangi Kabupaten Sukabumi merupakan bagian atau unit kerja dari perangkat daerah dan status hukumnya tidak terpisah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang ditawarkan tanpa mengutamakan keuntungan. Rumah Sakit Umum Daerah perlu diberi kesempatan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri sehingga dapat mengembangkan profesionalisme pelayanan tanpa dihambat oleh faktor birokrasi.(Indarto Waluyo,2011)

Sebagai Rumah Sakit berbentuk BLUD, maka RSUD Palabuhanratu dan Sekarwangi akan mempertanggungjawabkan aktifitasnya melalui laporan keuangannya. Hal ini sesuai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Arfianti, 2011).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Rosalin dan Kawedar, 2011).

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan memuat informasi akuntansi yang harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 pasal 28 ayat 2, menjelaskan bahwa tata cara penyusunan ikhtisar kinerja operasional dan pengintegrasian dengan laporan keuangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah antara lain : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Pemerintah memberikan sejumlah fleksibilitas untuk instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Unit Daerah (PPK-BLUD) antara lain dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasapengelolaan barang, pengelolaan piutang, utang, investasi, pemanfaatan surplus, dan remunerasi. Penerapan BLU rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong *entrepreneurship*, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu RSUD Kabupaten Sukabumi membutuhkan penanganan tentang kualitas informasi akuntansi serta agar Rumah Sakit tetap bertahan dan tumbuh, maka pihak manajemen harus memperhitungkan keuntungan dengan tidak mengurangi fungsi sosialnya, dengan perkembangan tersebut RSUD Kabupaten Sukabumi harus didukung informasi akuntansi yang berkualitas.

Reformasi bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan terbitnya PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara, maka informasi keuangan Negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan informasi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 24 tahun 2005, memunculkan tuntutan mengenai perlunya pemahaman teoritis dan praktis pada akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah, sebagai kunci dari pengelolaan keuangan daerah yang sehat (Afiah, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Laporan Keuangan RSUD Kabupaten

Sukabumi yang menerapkan PPK-BLUD harus diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa eksternal pemerintah yang dimaksud adalah BPK RI. Adapun sebagian kewenangan dari BPK RI dilimpahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka memberikan opini atas Penyajian Laporan Keuangan.

Disamping memberikan opini, KAP memberikan beberapa catatan kelemahan atas penyajian Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Sukabumi yang terjadi berulang dari tahun ke tahun, diantaranya :

- a. Kelemahan tentang tata kelola kas BLUD
- b. Kelemahan tentang kesalahan pencatatan (kode belanja)
- c. Kelemahan tentang kurang catat utang dan piutang jasa layanan Bulan Desember
- d. Nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Inventaris yang bersumber dari dana BLUD tidak tercatat dalam laporan keuangan
- f. Pencatatan Akun-akun Dalam Laporan Keuangan Tidak Konsisten

Keadaan ini memberikan fakta bahwa laporan keuangan RSUD Kabupaten Sukabumi masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dalam kualitas informasi laporan keuangan pemerintah berupa laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada RSUD Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian atau unit kerja dari perangkat daerah dan status hukumnya tidak terpisah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Standar

Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Lusi Putri Ikasari,dkk (2017) memberikan temuan empiris bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan RSUD Kabupaten Boyolali. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik. Demikian pula penelitian tentang Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya) yang dilakukan oleh Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Berbeda dengan hasil penelitian M.Ali Fikri,dkk tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB) menunjukkan hasil empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

BLUD RSUD Kabupaten Sukabumi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan

mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia rumah sakit dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat dirancang melalui suatu sistem pengendalian internal dengan tujuan umumnya adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian internal dalam organisasi akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran organisasi. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. (Lusi Putri Ikasari, 2017). Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan (Arens, Elder dan Beasle, 2007: 397-404).

Penelitian Lusi Putri Ikasari, dkk (2017) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan RSUD Kabupaten Boyolali, hal ini berarti bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik. Serta sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, RSUD Kabupaten Boyolali, hal ini berarti bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik.

Begitu pula dengan Penelitian A, RA Dwirina Komara and Aprila, Nila (2017) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu

menyatakan bahwa, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dimana jika kompetensi sumber daya manusia semakin tinggi maka efektifitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat, Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan keuangan, dimana jika system pengendalian internal semakin tinggi maka efektifitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat.

Berbeda dengan penelitian Faristina Rosalin (2011) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang), menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan dan timeliness pelaporan keuangan. Sedangkan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan.

Sedangkan penelitian Syayyidah Alifah (2014) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada PK BLU Universitas Negeri Surabaya) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, sedangkan variabel kualitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian Marsdenia (2016) tentang Kualitas Informasi Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik Daerah X (RSUD X KAB A), menyatakan bahwa Faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan entitas sektor publik, sedangkan faktor struktur Pengendalian Intern dan teknologi tidak memiliki pengaruh linier terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Sedangkan dengan memasukkan faktor pemoderasi yaitu fakto-

faktor eksternal, memberikan kesimpulan bahwa hanya faktor Sumber Daya Manusia yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan RSUD X

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Lusi Putri Ikasari, dkk (2017), memberikan temuan empiris bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan RSUD Kabupaten Boyolali. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik. Sejalan dengan penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan semakin tinggi persepsi pegawai berkaitan dengan pengimplementasian keadilan prosedural, maka semakin rendah kecenderungan pegawai untuk berbuat curang, sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat

waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2012: 146)

Penelitian Marsdenia (2016) mengungkapkan bahwa, Faktor SDM berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan entitas sektor publik, Lif Saipullah (2017) mengungkapkan bahwa, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Darwanis DAN Desi (2009) menyatakan bahwa, Secara parsial dan simultan variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Wiwik Andriani, SE., M. Si. Ak, (2010) mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, begitu pula penelitian A, RA Dwirina Komara and Aprilia, Nila (2017) menyatakan bahwa Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dimana jika kompetensi sumber daya manusia semakin tinggi maka efektifitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat. Begitu pula dengan penelitian Lusi Putri Ikasari, dkk (2017) menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Menurut hasil penelitian A, RA Dwirina Komara and Aprila, Nila (2017) mengungkapkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan keuangan, dimana jika system pengendalian internal semakin tinggi maka efektifitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat. Begitu pula penelitian Lusi Putri Ikasari,dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Faristina Rosalin (2011) menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan serta penelitian Syayyidah Alifah (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Teknologi Informasi dapat memoderasi pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Menurut hasil penelitian Marsdenia (2016) menyatakan bahwa, dengan memasukkan faktor pemoderasi yaitu faktor-faktor eksternal, memberikan kesimpulan bahwa hanya faktor eksternal tidak mampu memoderasi hubungan faktor pengendalian internal dan utilitas teknologi informasi dengan kualitas informasi laporan keuangan RSUD X . hanya faktor

Sumber Daya Manusia yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan RSUD X.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

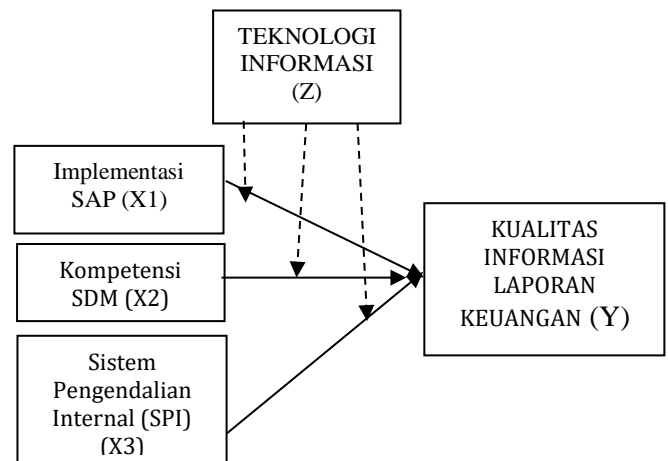
H₄: Teknologi Informasi memoderasi Pengaruh Implementasi SAP terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

H₅: Teknologi Informasi memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

H₆: Teknologi Informasi memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan kajian pustaka dan pengembangan hipotesis seperti yang telah diuraikan, maka dapat divisualisasikan hubungan antar variabel dalam kerangka pemikiran penelitian yang coba peneliti bangun seperti terlihat pada Gambar 1.

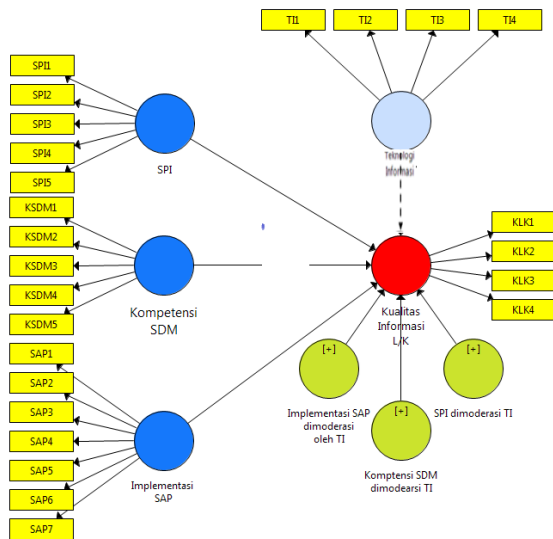
Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



METODE PENELITIAN

Model penelitian digunakan untuk menguji keenam hipotesis yang diajukan. Dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling base component/variance* seperti dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Diagram Jalur Penelitian



Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pegawai Pengelola BLUD RSUD Palabuhanratu dan Sekarwangi baik PNS maupun Non PNS.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini merupakan Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2016:85) Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yaitu sampling dengan kriteria tertentu yaitu (1) Pegawai yang mengotorisasi dibidang keuangan/tata usaha, (2) Pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan/akuntansi, (3) Pegawai yang telah bekerja sebagai pengelola BLUD RSUD Palabuhanratu dan Sekarwangi minimal 1 tahun. Hal ini dilakukan agar jawaban kuesioner dapat terjawab dengan baik pada subjek yang tepat dan berkompeten dibidangnya. Berdasarkan tabulasi responden yang memenuhi kriteria sebanyak 57 orang, yang terdiri dari :

Tabel 2
Daftar Responden Penelitian

No	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai yang mengotorisasi dibidang keuangan/tata usaha	
a.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)	8 Orang
b.	Pejabat Penguji Tagihan	2 Orang
2.	Pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan/akuntansi	
a.	Kepala Sub Bagian Keuangan	2 Orang
b.	Bendahara	6 Orang
c.	Staf Teknis Akuntansi/Keuangan	39 Orang
	Jumlah	57 Orang

Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2016:137) Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Data dapat dikumpulkan dengan setting alamiah (*natural setting*) atau pengaturan yang dilakukan terhadap objek penelitian seperti pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, serta pada suatu seminar, diskusi, di jalan atau ditempat lainnya apabila pengumpulan data menggunakan setting. Apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data bisa didapat dari sumber primer ataupun sumber sekunder seperti yang telah dijelaskan diatas. Selain itu, prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan suatu cara tertentu seperti wawancara (*interview*), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan), ataupun gabungan dari ketiganya

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling Based Component (CBSEM)* dengan SmartPLS 3.0 terdiri atas dua, yaitu: pengujian *outer model* dan *inner model* (Ghojali, I., 2006). Analisis *outer model* bertujuan untuk menggambarkan hubungan setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya (konstruk). Pengukuran *outer model* terdiri atas: *convergent validity* dan *composite reliability*. Sedangkan, pengukuran *inner model* bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten (konstruk)

berdasarkan pada tingkat substantif teori yang dikaji. Pengukuran *inner model* terdiri atas: koefisien jalur, R^2 , f^2 , Q^2 , dan GoF.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian analisis hasil penelitian ini menggunakan metode analisis SEM-PLS. Analisis penelitian mencakup pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Teknologi Informasi yang memoderasi pengaruh ketiga variabel tersebut

Statistik Deskriptif Sampel

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Dari 57 kuesioner yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada responden, jumlah kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk digunakan adalah seluruh kuesioner.

Data Demografi Responden

Data demografi responden merupakan data yang menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data demografis yang akan diuraikan dalam penelitian ini terdiri atas: pendidikan terakhir. Jurusan, golongan, lama kerja, umur, jenis kelamin, jabatan, pelatihan/bimbingan teknis. Rincian lengkap data demografi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Data Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan Terakhir	7	12,3%
	SMU	11	19,3%
	Diploma III	30	52,6%
	S1	9	9%
	S2		

	Jumlah	57	100%
2.	Jurusan		
	Akuntansi	42	73,7%
	Non Akuntansi	15	26,3%
	Jumlah	57	100%
3.	Golongan		
	Non PNS	29	50,9%
	Golongan II	4	7%
	Golongan III	17	29,8%
	Golongan IV	7	12,3%
	Jumlah	57	100%
4.	Lama Kerja		
	1 – 5 Tahun	23	40,4%
	6 – 10 Tahun	21	36,8%
	11 – 15 Tahun	5	8,8%
	16 – 20 Tahun	7	12,3%
	≥ 21 Tahun	1	1,8%
	Jumlah	57	100%
5.	Umur		
	20 – 30 Tahun	10	17,5%
	31 – 40 Tahun	32	56,1%
	41 – 50 Tahun	5	8,8%
	51 – 60 Tahun	10	17,5%
	Jumlah	57	100%
6.	Jenis Kelamin		
	Pria	29	50,9%
	Wanita	28	49,1%
	Jumlah	57	100%
7.	Jabatan		
	Staf	41	71%
	Bendahara	6	10,5%
	Bendahara Kasubag	2	3,5%
	Keuangan	2	3,5%
	Kabag TU	6	10,5%
	Kuasa Pengguna Anggaran		

	Jumlah	57	100%
8.	Pelatihan/Bintek		
	Belum Bintek	27	47,4%
	Keuangan		
	Sudah Bintek	30	52,6%
	Keuangan		
	Jumlah	57	100%

Tabel 3 menunjukkan diketahui sebagian besar responden mempunyai Pendidikan terakhir sarjana atau strata satu sebanyak 30 responden (52,6%). Jurusan pendidikan terakhir responden sebagian besar akuntansi sebanyak 42 responden (73,7%). Golongan responden sebagian besar Non PNS sebanyak 29 responden (50,9%). Lama kerja responden sebagian besar 1-5 tahun sebanyak 23 responden (40,4%). Umur responden sebagian besar antara 31-40 tahun sebanyak 32 responden (56,1%). Jenis kelamin responden sebagian besar pria sebanyak 29 responden (50,9%) dan wanita sebanyak 28 responden (49,18%). Jabatan responden sebagian besar staf bendahara sebanyak 41 responden (71%). Pelatihan/Bimbingan teknik (bimtek) yang pernah diikuti sebagian besar responden sudah mengikuti Pelatihan/Bimbingan teknik (bimtek) sebanyak 30 responden (52,6%)

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Untuk variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan, pada penelitian ini peneliti mengembangkan empat indikator untuk menjelaskan kualitas informasi laporan keuangan yang disusun oleh pengelola keuangan RSUD Kabupaten Sukabumi, yaitu: Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hasil statistik deskriptif dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks adalah seperti disajikan dengan Tabel 4 berikut ini

Tabel 4

Indeks Kualitas Informasi Laporan Keuangan

No.	Indikator Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Frekuensi Jawaban Responden					Indeks KLIK
		Kualitas Informasi Laporan Keuangan					
		1	2	3	4	5	
1.	Laporan keuangan yang relevan	-	2,00	1,33	22,33	31,33	4,46
2.	Laporan keuangan yang andal	-	0,60	1,40	14,60	40,40	4,66
3.	Laporan keuangan yang dapat dibandingkan	-	-	-	4,00	53,00	4,93
4.	Laporan keuangan yang dapat dipahami	-	-	-	9,33	47,67	4,84
Rata-Rata:							4,72

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada RSUD Kabupaten Sukabumi umumnya memiliki kinerja yang “*sangat tinggi*”. Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa dari rentang nilai indeks 1.00–5.00, pengelola keuangan pada RSUD Kabupaten Sukabumi telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan memiliki nilai indeks total variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 4.42 yang berarti tingkat Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab penyusunan laporan keuangan yang diberikan kepadanya adalah “*sangat tinggi*”. Indeks total tersebut disumbangkan dari lima indikator yang berada dalam kategori “*sangat tinggi*”, yaitu: indikator Penyajian laporan Keuangan (4.72), indikator Laporan Perubahan SAL (4.49), indikator Laporan Perubahan Ekuitas (4.56) dan indikator Laporan Operasional dan laporan arus kas (4.51). Sedangkan, dua indikator lainnya berada dalam kategori “*tinggi*”, yaitu: indikator Neraca (4.00) dan indikator Laporan Realisasi Anggaran (4.15).

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Untuk variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, pada penelitian ini peneliti menggunakan tujuh

indikator untuk menjelaskan tingkat implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan, yaitu: penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan perubahan ekuitas. Hasil statistik deskriptif dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks adalah seperti disajikan dengan Tabel 5 berikut ini

Tabel 5
Indeks Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

No.	Indikator Implementasi SAP	Frekuensi Jawaban Responden					Indeks SAP
		1	2	3	4	5	
1.	Penyajian laporan Keuangan	-	0,75	2,00	9,50	44,75	4,72
2.	Laporan Realisasi Anggaran	1,14	6,71	2,14	19,71	27,29	4,15
3.	Laporan Perubahan SAL	-	-	0,50	28,00	28,50	4,49
4.	Neraca	0,33	9,67	1,67	23,33	22,00	4,00
5.	Laporan Operasional	-	-	4,00	20,00	33,00	4,51
6.	Laporan Arus Kas	-	-	1,50	25,00	152,5	4,51
7.	Perubahan Ekuitas	-	-	2,50	20,00	34,50	4,56
Rata-Rata:							4,42

Sumber: Data primer yang diolah

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, pada penelitian ini peneliti menggunakan lima indikator untuk menjelaskan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yaitu: latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, pelatihan dan pengalaman. Hasil statistik deskriptif dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks adalah seperti disajikan dengan Tabel 6 berikut ini

Tabel 6
Indeks Kompetensi SDM

No.	Indikator Kompetensi SDM	Frekuensi Jawaban Responden					Indeks SDM
		1	2	3	4	5	
1.	Latar Belakang Pendidikan	1,00	2,00	6,00	25,00	23,00	4,18
2.	Pengetahuan	-	-	1,50	16,00	39,50	4,67
3.	Keahlian	0,50	20,00	6,50	20,50	9,50	3,32
4.	Pelatihan	-	2,67	1,00	32,67	20,67	4,25
5.	Pengalaman	-	-	5,00	52,00	-	3,91
Rata-Rata:							4,07

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pengelola keuangan pada RSUD Kabupaten Sukabumi umumnya memiliki kompetensi yang “tinggi”. Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa dari rentang nilai indeks 1.00–5.00, pengelola keuangan pada RSUD Kabupaten Sukabumi memiliki nilai indeks total variabel Kompetensi SDM sebesar 4.07 yang berarti tingkat kompetensi pengelola keuangan adalah “tinggi”. Indeks total variabel tersebut disumbangkan dari empat indikator yang berada dalam kategori “tinggi”, yaitu: indikator Latar Belakang Pendidikan (4.18), indikator pengetahuan (4.67), indikator pelatihan (4.25) dan indikator Pengalaman (3.91). Sedangkan indikator pengetahuan (3.32) yang berada dalam kategori “cukup tinggi”

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Interen

Untuk variabel sistem pengendalian interen, pada penelitian ini peneliti menggunakan lima indikator untuk menjelaskan pelaksanaan sistem pengendalian interen pada RSUD Kabupaten Sukabumi, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Hasil statistik deskriptif dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks adalah seperti disajikan dengan Tabel 7 berikut ini

Tabel 7
Indeks Sistem Pengendalian Interen (SPI)

No.	Indikator Sistem Pengendalian Interen	Frekuensi Jawaban Responden					Indeks SPI
		Sistem Pengendalian Interen					
		1	2	3	4	5	
1.	Lingkungan pengendalian	-	3,25	0,50	28,50	24,75	4,31
2.	Penilaian Resiko	-	-	2,00	49,50	5,50	4,06
3.	Kegiatan Pengendalian	-	-	1,75	34,00	21,25	4,34
4.	Informasi dan Komunikasi	-	2,00	1,33	45,67	8,00	4,05
5.	Pemantauan	-	1,50	-	38,00	17,50	4,25
Rata-Rata:							4,20

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPI pada RSUD Kabupaten Sukabumi umumnya memiliki SPI yang “tinggi”. Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa dari rentang nilai indeks 1.00–5.00, pengelola keuangan pada RSUD Kabupaten Sukabumi memiliki nilai indeks total variabel SPI sebesar 4.20 yang berarti pelaksanaan SPI adalah “sangat tinggi”. Indeks total tersebut disumbangkan dari tiga indikator yang berada dalam kategori “sangat tinggi”, yaitu: indikator lingkungan pengendalian (4.31), kegiatan pengendalian (4.34), dan indikator pemantauan (4.25). Sedangkan dua indikator lainnya berada dalam kategori “tinggi”, yaitu: indikator penilaian resiko (4.06), dan indikator informasi dan komunikasi serta pemantauan (4.05).

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Teknologi Informasi

Untuk variabel teknologi informasi, pada penelitian ini peneliti mengembangkan empat indikator untuk menjelaskan tingkat penggunaan teknologi informasi, yaitu: pemanfaatan internet, pengolahan data terintegrasi, pemeliharaan komputer serta informasi dan komunikasi. Hasil statistik deskriptif dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks adalah seperti disajikan dengan Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Indeks Teknologi Informasi

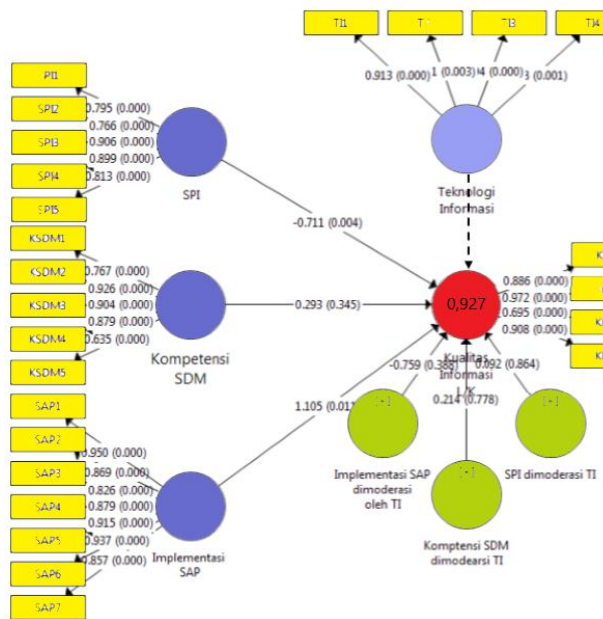
No.	Indikator Teknologi Informasi	Frekuensi Jawaban Responden					Indeks TI
		Teknologi Informasi					
		1	2	3	4	5	
1.	Pemanfaatan internet	-	4,00	-	52,50	0,50	3,87
2.	Pengolahan data yang terintegrasi	-	3,00	2,00	45,00	3,00	3,99
3.	Pemeliharaan Komputer	-	3,00	6,00	45,00	3,00	3,84
4.	Informasi dan Komunikasi	-	8,33	3,33	35,00	10,33	3,83
Rata-Rata:							3,88

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Model Pengukuran Outer Model

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis untuk memprediksi hubungan antara variabel laten dalam model struktural, terlebih dahulu dilakukan evaluasi model pengukuran untuk memverifikasi indikator sehingga variabel laten dapat diuji pada tahap-tahap berikutnya. Dalam penelitian ini evaluasi *outer model* terdiri atas dua, yaitu: uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan *convergent validity* dan *convergent validity* (AVE). Uji reliabilitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *composite reliability* dan *cronbach alpha*. *Convergent validity* menjelaskan sejauh mana hubungan antara variabel laten (konstruk) dengan indikator yang berusaha untuk dijelaskannya (Ghojali, I., 2006). Suatu indikator dikatakan memenuhi *convergent validity* jika antara variabel laten dengan indikatornya memiliki nilai kolerasi (*loading factor* yang sering dinotasikan λ) di atas 0.70. Walaupun demikian dalam riset-riset pada tahap pengembangan nilai kolerasi antara 0.50 sampai 0.60 masih dapat diterima (Chin, 1998 dalam Ghojali, I. 2006).

Gambar 3 Diagram Jalur disertai Loading Factor



Berdasarkan Gambar 3, semua variabel laten memiliki nilai *loading factor* yang berkisar antara 0.551 sampai 0.972. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari 25 item pernyataan yang digunakan seluruhnya memenuhi kriteria pengujian *convergent validity*.

Sedangkan mengukur *Average Variance Extracted* berfungsi untuk mengukur korelasi indikator dengan variabel latennya. Untuk melaksanakan uji validitas *convergent validity*, nilai *Average Variance Extracted* diharapkan > 0.5. Hasil pengujian *Average Variance Extracted* ditunjukkan dengan Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Hasil Pengujian
Average Variance Extracted

Variabel Laten	Akar AVE	Cut Off	Keputusan
Implementasi SAP	0.794		Variabel laten dinyatakan valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.688		Variabel laten dinyatakan valid
Sistem Pengendalian Interen	0.702	≥0.5	Variabel laten dinyatakan valid
Teknologi Informasi	0.647		Variabel laten dinyatakan valid
Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.760		Variabel laten dinyatakan valid

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Suatu instrumen dikatakan memenuhi kriteria pengujian *Average Variance Extracted* jika nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 0.5 (Ghozali, I., 2016:43). Berdasarkan Tabel 4.10 di atas diketahui bahwa: semua variabel laten memiliki nilai *Average Variance Extracted (AVE)* berkisar antara 0.647 sampai 0.794 yang berarti lebih besar dari 0.5 dengan demikian dapat disimpulkan keseluruhan variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria pengujian *Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai *Average Variance Extracted (AVE)*

Pengukuran *outer model* dengan uji reliabilitas selanjutnya adalah *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang disajikan pada Tabel 10 :

Tabel 10
Nilai *Composite Reliability* dan *cronbach's alpha*

Variabel Laten	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan	0.964	0.956
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.916	0.882
SPI	0.921	0.895
Teknologi Informasi	0.877	0.839
Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.926	0.890

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Suatu instrumen dikatakan memenuhi kriteria pengujian *composite reliability* jika nilai *composite reliability* yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 0.6 (Ghozali, I., 2016:43). Berdasarkan Tabel 10 di atas diketahui bahwa: semua variabel laten

memiliki nilai *composite reliability* berkisar antara 0.877 sampai 0.964 yang berarti lebih besar dari 0.6 dengan demikian dapat disimpulkan keseluruhan variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria pengujian *composite reliability*.

Suatu instrumen dikatakan memenuhi kriteria pengujian *cronbach alpha* jika nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 0.6 (Ghozali, I., 2016:43). Berdasarkan Tabel 10 di atas diketahui bahwa: semua variabel laten memiliki nilai *cronbach alpha* berkisar antara 0.839 sampai 0.956 yang berarti lebih besar dari 0.6 dengan demikian dapat disimpulkan keseluruhan variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria pengujian *cronbach's alpha*.

Inner Model

Model struktural (*inner model*) merupakan model yang menggambarkan hubungan antar variabel laten yang dievaluasi menggunakan koefisien jalur, R^2 , f^2 , Q^2 , dan GoF (*Goodness of Fit*).

Hasil koefisien jalur dan nilai t statistik yang didapatkan melalui proses *bootstrapping* dengan jumlah sampel 57 dan pengulangan sebanyak 500 kali iterasi ditunjukkan pada Tabel 11 :

Tabel 11
Nilai Koefisien Jalur Model Struktural

Keterangan	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Langsung (Direct Effect):				
Implementasi_SAP-> Kualitas_Informasi_LIK	1,105	0,446	2,475	0,014
Kompetensi_SDM-> Kualitas_Informasi_LIK	0,293	0,308	0,951	0,342
SPI-> Kualitas_Informasi_LIK	-0,711	0,253	2,744	0,006
Teknologi_Informasi-> Kualitas_Informasi_LIK	0,008	0,752	0,011	0,991
Tidak Langsung (Indirect Effect)				
Implementasi_SAP dimoderasi oleh TI-> Kualitas_Informasi_LIK	-0,759	0,833	0,911	0,363
Kompetensi_SDM dimoderasi TI-> Kualitas_Informasi_LIK	0,214	0,756	0,283	0,777
SPI dimoderasi TI-> Kualitas_Informasi_LIK	0,092	0,515	0,178	0,859

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Selanjutnya adalah uji kelayakan model menggunakan nilai R^2 . Evaluasi

kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi konstruk eksogen atau konstruk-konstruk eksogen terhadap konstruk endogen yang dikuantifikasi dalam satuan persen (%). Hasil evaluasi kontribusi antara konstruk eksogen dengan konstruk endogen sebesar 0,927. Angka tersebut menjelaskan variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen sebesar 92,7%, sisanya 7,3% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel eksogen yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Selain menguji R^2 , juga dilakukan pengujian terkait pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen yang dapat diketahui berdasarkan nilai *effect size* atau f^2 yang dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Hasil Pengujian Substantif (f^2)

Konstruk Eksogen terhadap Konstruk Endogen	Kontribusi (f^2) terhadap Konstruk Endogen	Cut Off	Interpretasi
Implementasi SAP → Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.524	$f^2 \geq 0.02$, Lemah $f^2 \geq 0.15$, Medium $f^2 \geq 0.35$, Besar	Besar
Kompetensi Sumber Daya Manusia → Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.065		Lemah
SPI → Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.423		Besar
Implementasi SAP dimoderasi oleh Teknologi Informasi → Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.051		Lemah
Kompetensi SDM dimoderasi oleh Teknologi Informasi → Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.009		Lemah
SPI dimoderasi oleh Teknologi Informasi → Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0.003		Lemah

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Suatu konstruk eksogen memiliki tingkat substansi terhadap konstruk endogen yang dapat diinterpretasikan *lemah* jika memiliki nilai f^2 lebih besar atau sama dengan 0.02, *medium* jika memiliki nilai f^2 lebih besar atau sama dengan 0.15 dan *besar* jika memiliki nilai f^2 lebih besar atau sama dengan 0.35 (Ghozali, I., 2016:42). Berdasarkan Tabel 12 di atas, diketahui bahwa: Terdapat empat hubungan yang memiliki tingkat substansi yang dapat

diinterpretasikan *lemah*, yaitu: hubungan antara konstruk eksogen Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap konstruk endogen Kualitas Informasi Laporan Keuangan, konstruk eksogen Implementasi SAP terhadap konstruk endogen Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan moderasi Teknologi Informasi, konstruk eksogen Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap konstruk endogen Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan moderasi Teknologi Informasi dan konstruk eksogen Sistem Pengendalian Interen terhadap konstruk endogen Kualitas Informasi Laporan Keuangan dimoderasi dengan moderasi Teknologi Informasi memiliki nilai f^2 berkisar antara 0.003 sampai 0.065 (di atas 0.02).

Terdapat dua hubungan yang memiliki tingkat subtansi yang dapat diinterpretasikan *besar*, yaitu: hubungan antara konstruk eksogen Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap konstruk endogen Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan hubungan antara konstruk eksogen Sistem Pengendalian Interen terhadap konstruk endogen Kualitas Informasi Laporan Keuangan memiliki nilai f^2 berkisar antara 0.423 sampai 0.524 (di atas 0.35).

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengujian enam hipotesis yang terdiri atas: tiga hipotesis langsung dan tiga hipotesis tidak langsung seperti yang telah diuraikan pada bagian pengujian hipotesis terdahulu, maka dapat dibuat kesimpulan penerimaan dan penolakan hipotesis seperti disajikan dengan Tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13

Kesimpulan Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Variabel	$Z_{\alpha/2}$				Kep.	P Value		
	Z_{α}	$Z_{1-\alpha/2}$	$Z_{\alpha/2}$	$Z_{1-\alpha}$		Prob.	Sig.	Kep.
SAP → KLK	2.475	1.960	-	-	H_0 Ditolak	0.014	0.050	H_0 Ditolak
SAP → TI → KLK	0.911			1.650	H_0 Diterima	0.363	0.10	H_0 Diterima
KSDM → KLK	0.951			1.650	H_0 Diterima	0.342	0.10	H_0 Diterima
KSDM → TI → KLK	0.283			1.650	H_0 Diterima	0.777	0.10	H_0 Diterima
SPI → KLK	2.744		2.580		H_0 Ditolak	0.006	0.01	H_0 Ditolak
SPI → TI → KLK	0.178			1.650	H_0 Diterima	0.991	0.10	H_0 Diterima

Sumber: Data primer yang diolah

Pengaruh Langsung Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Pengaruh Tidak Langsung dengan moderasi Teknologi Informasi

Hipotesis kesatu (H_{1-1}) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh langsung terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Berdasarkan tabel 13, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_{1-1}), yang menyatakan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh langsung terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan terbukti atau terdukung dengan fakta.

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan pendapat Nordiawan, 2006 yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang optimal memiliki peranan penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi. Hal ini juga berarti bahwa terwujudnya kualitas informasi laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tergantung dari bagaimana setiap perangkat daerah mengoptimalkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah

ditetapkan. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelola keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi dengan jumlah responden 57 orang telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan memiliki nilai indeks total variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 4.42 yang berarti tingkat Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab penyusunan laporan keuangan yang diberikan kepadanya adalah “*sangat tinggi*”.

Hal ini dapat diartikan juga bahwa dengan mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan secara optimal dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yang memenuhi kriteria relevan (memiliki manfaat umpan balik/*feedback value*, memiliki manfaat prediktif/*predictive value*, tepat waktu, lengkap), andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia). Hal ini juga sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Ronni Nainggolan, 2017).

Hasil pengujian hipotesis ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh: Lusi Putri Ikasari,dkk (2017), Kusumah (2012), Ronni Nainggolan (2017) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel Implementasi SAP berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan. Namun berlawanan dengan hasil penelitian M.Ali Fikri,dkk yang menunjukkan hasil empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis kedua (H_{1-2}) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Teknologi Informasi memoderasi hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Berdasarkan tabel 13, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimoderasi Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_{1-2}), yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi memoderasi hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan tidak terbukti atau tidak terdukung dengan fakta.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung pernyataan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik salah satunya adalah dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis teknologi informasi

Pengaruh Langsung Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Pengaruh Tidak Langsung dengan moderasi Teknologi Informasi

Hipotesis ketiga (H_{2-3}) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh langsung terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Berdasarkan Tabel 13, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_{2-3}), yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh langsung terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan tidak terbukti atau tidak didukung dengan fakta.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam suatu organisasi, yaitu menurut Willey (2002:3) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan didukung oleh pengalaman/masa kerja responden pengelola keuangan yang sudah cukup lama di bidangnya serta seringkali responden mengikuti pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan daerah sehingga diduga dapat meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan. Dari data demografi lama kerja yang dominan sekitar 1-5 tahun (40,4%), sedangkan responden yang telah mengikuti bintek/pelatihan keuangan hanya mengikuti 1-2 kali bintek/pelatihan keuangan. Hal ini didukung dengan data statistik deskriptif variabel kompetensi sumber daya manusia yaitu keahlian dan pengalaman yang merupakan indikator indeks kompetensi Sumber Daya Manusia paling rendah dibanding indikator lainnya 3.32 dan 3.91. Hal ini juga sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dinilai dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya yang tertuang dalam deskripsi jabatan, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Tjiptoherijanto, 2001)

Hasil pengujian hipotesis ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh : Patras Thebora, dkk (2017), Annisa

Rachmawati (2014), M. Ali Fikri, Faristina Rosalin (2011), Syayyidah Alifah (2014). Namun berlawanan dengan hasil penelitian Marsdenia (2016), Lif Saipullah (2017), Darwanis dan Desi (2009), Wiwik Andriani, SE., M. Si. Ak,(2010), A.RA Dwirina Komara and Aprilia, Nila (2017), Lusi Putri Ikasari,dkk (2017).

Hipotesis keempat (H_{2-4}) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Teknologi Informasi memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Berdasarkan tabel 13, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang secara tidak langsung tidak berpengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan moderasi Teknologi Informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_{2-4}), yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi memoderasi hubungan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan tidak terbukti atau tidak didukung dengan fakta, artinya Teknologi Informasi tidak mampu menguatkan hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Fenomena yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia sehingga hal ini pula akan berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kondisi letak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi terutama Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu yang sering mendapat gangguan jaringan/internet serta kurangnya tenaga IT yang bertugas mencari solusi atas gangguan penggunaan teknologi informasi

Pengaruh Langsung Sistem Pengendalian Interen terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Tidak Langsung dengan Moderasi Teknologi Informasi

Hipotesis kelima (H_{3-5}) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Sistem Pengendalian Interen berpengaruh langsung terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Berdasarkan tabel 13, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara Sistem Pengendalian Interen terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_{3-5}), yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Interen berpengaruh langsung terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan terbukti atau didukung dengan fakta.

Hal ini sesuai dengan teori Kiranayanti dan Erawati (2016: 1299-1300), yaitu tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan rumah sakit mengalami kekeliruan.

Salah satu faktor yang menentukan keandalan dari laporan keuangan adalah Sistem pengendalian internal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen sehingga ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melakukan pelatihan serta pembinaan demi meningkatkan kualitas pegawai dibidangnya. Sumber daya manusia akan melakukan pekerjaan dengan baik jika ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikannya. Selain penempatan yang sesuai, Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan instansi pemerintahan daerah juga harus memberikan pelatihan demi meningkatkan kualitas dari pegawai tersebut. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal Rumah Sakit Umum Daerah harus memadai. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

pelaksanaan SPI pada RSUD Kabupaten Sukabumi umumnya memiliki indeks “tinggi” (4.20) artinya pengelola keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi dengan jumlah responden 57 orang telah menerapkan standar pengendalian interen dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Hasil pengujian hipotesis ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh: A, RA Dwirina Komara and Aprila, Nila (2017), Lusi Putri Ikasari, dkk (2017), Faristina Rosalin (2011), Syayyidah Alifah (2014). Namun berlawanan dengan penelitian M. Ali Fikri, Marsdenia (2016), Faristina Rosalin (2011).

Hipotesis keenam (H_{3-6}) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Teknologi Informasi memoderasi Sistem Pengendalian Interen terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Berdasarkan tabel 13, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh positif Sistem Pengendalian Interen yang dimoderasi Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H_{3-6}), yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi memoderasi Sistem Pengendalian Interen terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan tidak terbukti atau tidak didukung dengan fakta

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis seperti yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan faktor dominan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas baik, artinya semakin tinggi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam

- penyusunan laporan keuangan, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan semakin meningkat.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia bukan merupakan hubungan langsung terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, baik dengan atau tanpa variabel penguatnya (moderasi) Teknologi Informasi. Secara implisit Kualitas Informasi Laporan Keuangan tidak tergantung kepada Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 3. Sistem Pengendalian Interen berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin memadainya sistem pengendalian internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, akan berdampak terhadap peningkatan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Satuan Kerja perlu melakukan penguatan efektifitas Sistem Pengendalian Interen secara terus menerus dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
 4. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan moderasi Teknologi Informasi. Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan apabila dimoderasi oleh Teknologi Informasi menjadi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Secara implisit Teknologi Informasi tidak dapat memperkuat Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan secara parsial. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Teknologi Informasi bukan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
 5. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pula dengan moderasi Teknologi Informasi. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa fungsi Teknologi Informasi bukan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
 6. Sistem Pengendalian Interen tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan moderasi Teknologi Informasi. Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa Sistem Pengendalian Interen apabila dimoderasi oleh Teknologi Informasi menjadi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Secara implisit Teknologi Informasi tidak dapat memperkuat Sistem Pengendalian Interen dalam meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan secara parsial. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Teknologi Informasi bukan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Sistem Pengendalian Interen terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran kepada peneliti selanjutnya :

1. Sebaiknya mengubah atau menambah variabel penelitian lainnya diluar penelitian ini seperti komitmen organisasi, kerjasama tim, budaya kerja dan lain-lain untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan RSUD.
2. Dapat lebih maksimal dalam memperoleh data melalui kuesioner dan dengan mencari waktu yang tepat bagi responden untuk mengisi kuesioner melalui wawancara langsung, memberikan pemahaman

kepada responden yang kurang paham terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan sehingga pengisian kuesioner lebih jelas dan terhindar dari biasanya jawaban responden.

3. Diharapkan dapat memperluas populasi dan obyek penelitian. Populasi penelitian tidak hanya diambil dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, mungkin saja bisa dikembangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Profinsi Jawa Barat.
4. Untuk membangun model mediasi, misalnya mediasi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
5. Bagi Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan BLUD

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rachmawati, 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali)*.
- A,RA.Dwirina Komara dan Aprila, Nila , 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Yunus Bengkulu*.
- Bodnar H George William S. Hopwood. 2007. *Accounting Information System*. Edisi 9. Terjemahan. Penerbit Andi
- Chandrarini, G., 2017. *Metode Riset Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanis, 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Faristina Rosalin, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*.
- Ferdinand, A., 2014. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., 2014. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif: Untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hadi, N. U., Abdullah, N., & Sentosa, I., 2016. Making Sense of Mediating Analysis: A Marketing Perspective. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 62-76.
- Herawati, Tuti, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)". *STAR–Study & Accounting Research*. Vol XI, No. 1, h. 1-14. STIE STEMBI – Bandung Business School. Bandung.
- Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm :Managerial Behaviour agency and Ownership Structure*.

- Journal of Finance Economics 3, PP 305-360.
- Jonas, Gregory J dan Jeannot Blanchet, 2000, Assessing Quality of Finacial Reporting. Accounting Horizons, September 14,3;Pg.353
- Kementerian Dalam Negeri, 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)*, Jakarta.
- Kiranyanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 16. No 2 h. 1290- 1318. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali
- Kusumah A.A, 2012. *Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*.
- Lif Saipullah, 2017. *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Lingkungan Eksternal Sebagai Variabel Moderating*.
- Lillrank, Paul. 2003. "The Quality Of Informations", International Journal Of Quality dan Reliability Management Volume 20. Nomor 6 pp. 691-703
- Lusi Putri Ikasari,Suharno,Bambang Widarno, 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali*.
- M. Ali Fikri Biana, Adha Inapty Rr., Sri Pancawati, Martiningsi. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB)*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marsdenia, 2016. *Kualitas Informasi Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik Daerah X (RSUD X KAB A)*.
- Mindrajaya, I. N., & Sumertajaya, I., 2008. *Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika*, 118-132.
- Nordiawan, D., 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Patras Thebora, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu ,2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Bpk-Ad Kantor Walikota Manado*.
- Permatasari, F. A., Sulindawati, N., & Sudjana, E., 2016. *Pengaruh Komitmen Profesi, Integritas, Objektivitas, Kompetensi, dan Perilaku Profesional terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa, 1-12.
- Republik Indonesia, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)*, Jakarta.

- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2015. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49)*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138)*, Jakarta. Republik Indonesia, 2008.
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127)*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)*, Jakarta.
- Ronni Nainggolan, 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating.
- Sekaran, U., 2007a. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi 4, Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., 2007b. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi 4, Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholiha, E. N., & Salamah, M., 2015. *Structural Equation Modeling Partial Least Square untuk Pemodelan Derajat Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Jawa Timur 2013)*. Jurnal Sains dan Seni ITS, 169-174.
- Sri Hartaty, Maria Maria, Maria Sari (2017). *Determinan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syayyidah Alifah, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada PK BLU Universitas Negeri Surabaya)*.

- Tantriani Sukmaningrum. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)*.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Sutystic Soemitro. 2001. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cita Putra Bangsa
- Waluyo, M. (2011). *Panduan dan Aplikasi Structural Equation Modelling*. Jakarta: Indeks.
- Wilkinson, J.W., Cerullo, M.J., Raval, V. and Wong-On-Wing, B. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. (4 th Edition)*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd
- Wiwik Andriani, SE., M. Si. Ak, 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)*